



Judul : Anggaran Kunker DPR Naik 77% : Moratorium Studi Banding Dipertanyakan
Tanggal : Senin, 17 September 2012
Surat Kabar : Seputar Indonesia
Halaman : 4

Anggaran Kunker DPR Naik 77%

Moratorium Studi Banding Dipertanyakan

JAKARTA – Niat DPR untuk mengevaluasi dan moratorium agenda pelesiran ke luar negeri ternyata masih sulit diwujudkan. Bukan menghentikan program yang menunai banyak protes itu, alokasi anggarannya justru dinaikkan.

Indonesia Budget Center (IBC) melansir, anggaran kunjungan kerja (kunker) DPR pada 2013 justru diusulkan naik sebesar 77%. Pada 2013, DPR juga kembali merencanakan bepergian ke 38 negara dengan anggaran mencapai Rp248,12 miliar. Jumlah negara yang akan dikunjungi itu diduga masih akan bertambah.

“Jumlah itu naik 77% diban-

ding anggaran kunker tahun 2012 sebesar Rp139,94 miliar. Rupanya, kuping politisi Senayan sudah kebal dengan kritik publik,” tandas peneliti IBC Roy Salam di Jakarta kemarin.

Menurut dia, kritik publik terkait tidak efektifnya beberapa kegiatan studi banding atau kunker DPR justru dibalas dengan membandingkan kecilnya anggaran perjalanan

dinas DPR dengan besarnya biaya perjalanan dinas di kementerian/lembaga. Padahal, rakyat telah memberikan mandat kepada DPR untuk mengawasi kinerja pemerintah melalui hak bujet DPR untuk mengerem pemborosan anggaran perjalanan dinas di lingkungan eksekutif.

“Tentu saja, saya memberikan apresiasi positif atas inisiatif sebagian kecil anggota DPR yang masih memiliki dedikasi untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas di tubuh lembaga perwakilan rakyat. Itu diwujudkan dengan membuat laporan kunker dan memublikasi kepada masyarakat,” paparnya.

Transparansi itu, ujar Roy, sesuai dengan Pasal 79, huruf f,

“Rupanya, kuping politisi Senayan sudah kebal dengan kritik publik.”

ROY SALAM
Peneliti IBC

UU No 27/2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang mewajibkan anggota untuk taat pada prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara termasuk soal penggunaan anggaran.

Sementara itu, Ketua DPR Marzuki Alie mengklaim, DPR saat ini merupakan lembaga yang sangat terbuka. Menurut

DPR - RI

dia, DPR sudah menjadi contoh bagi lembaga lain perihal keterbukaan informasi publik. “Apa saja data di DPR bisa diambil. Otomatis dengan keterbukaan banyak kritik. Orang lain tidak ada keterbukaan. *Good governments* salah satunya transparansi. Pengelolaan yang baik ada transparansi. DPR sangat transparan makanya kritik yang masuk sangat banyak meskipun kritiknya tidak adil,” tandasnya.

Marzuki mengaku, sebagai pimpinan DPR, dirinya sudah melakukan usaha penghematan yang luar biasa soal kunker ke luar negeri. Dalam tata tertib DPR, ujarnya, sebenarnya sudah diatur mengenai perjalanan ke luar negeri hanya

diperuntukkan bagi kegiatan pengawasan dan legislasi.

Namun, saat ada kritik yang luar biasa dari publik, terutama saat ada keberangkatan ke luar negeri pada awal 2010, akhirnya pimpinan DPR memutuskan kunker ke luar negeri dalam konteks pengawasan sama sekali tidak diizinkan.

“Itu sudah diperbaiki. Kalau dalam konteks legislasi, saya dapat pesan dari Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas) agar berhati-hati menyangkut kebijakan publik. Jangan membuat aturan pembatasan dalam rangka studi komparasi. Pasalnya, kebijakan publik harus dapat referensi yang luas,” tandasnya.

Marzuki mengungkapkan,

atas dasar itulah, kunker ke luar negeri dalam kaitan legislasi masih diizinkan. Namun, itu pun masih diberikan batasan. Jika produk legislasi direvisi lebih dari 50%, akan diizinkan. Sebaliknya, jika di bawah itu, pimpinan DPR tidak akan mengizinkan. Menurut dia, DPR memang lembaga yang membuat kebijakan publik dan manfaatnya untuk rakyat. Jika UU sudah jadi dan dilaksanakan, publik juga yang menikmati hasilnya.

“Misalnya, Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Melahirkan perlindungan kesehatan, perlindungan hari tua, dan lain-lain. Itu dirasakan ketika UU itu dilaksanakan,” pungkasnya.

● radi saputro